

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (*The Effect of Islamic Corporate Governance and Islamic Social Reporting on the Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia*)

Ibnu Trilaksono^{1*}, Agrianti Komalasari², Chara P. T. Tubarad³, Yuliansyah Yuliansyah⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2,3,4}
ibnutrilaksono.it@gmail.com^{1*}, agriantiksa@gmail.com², charatidespania@yahoo.com³,
yuliansyah@feb.unila.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 07 April 2021
Revisi 1 pada 13 April 2021
Revisi 2 pada 15 April 2021
Revisi 3 pada 15 April 2021
Revisi 4 pada 27 Mei 2021
Revisi 5 pada 07 Juni 2021
Disetujui pada 09 Juni 2021

Abstract

Purpose: This study examined the effect of Islamic Corporate Governance and Islamic Social Reporting on the Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia at Sharia Commercial Bank Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange.

Research methodology: This study used multiple regression as the method to analyze the result of the research. By using 14 shariah banking data, this research will analyze the performance of the Indonesian general bank.

Result: This study indicates that the variables that affect Islamic bank performance in this research are not implemented effectively.

Limitations: The sample of this study was only 14 Islamic commercial banks and only used the Islamic banking sector in Indonesia, which is listed on the Indonesia stock exchange.

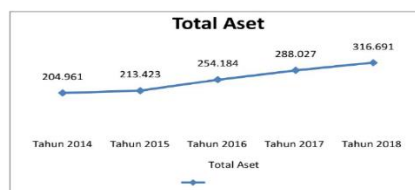
Contribution: This research is helpful for further research. One of the guidelines in choosing which variabels to use and which one to use in the study should be understood in selecting Islamic financial performance.

Keywords: *Financial Performance, Islamic Social Reporting, OCOI Index*

How to cite: Trilaksono, I. (2021). Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang terlisting di Bursa Efek Indonesia 2014-2018). *Bukhori: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 11-20.

1. Pendahuluan

Industri Perbankan Indonesia terus menjadi perbincangan yang hangat dimasyarakat. Baik Bank Konvensional maupun Syariah terus berlomba untuk menarik hati para nasabah dan mempertahankan tingkat kepuasan mereka. Salah satu kinerja yang semakin baik dapat dilihat dari perkembangan peningkatan aset perbankan Syariah yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Gambar 1. Keseluruhan Total Asset Perbankan Syariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah 2014-2018 (ojk.go.id 2018).

Tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) digunakan sebagai basis atau dasar dalam pelaporan *Islamic Social Reporting* (ISR). [Chariri \(2012\)](#) menemukan bahwa ICG secara positif mempengaruhi pelaporan ISR. Karenanya penerapan prinsip-prinsip tata Kelola dalam perbankan syariah sangat diperlukan bagi lembaga perbankan syariah dengan tujuan agar bank memiliki tanggung jawab terhadap publik terkait dengan kegiatan usaha bank syariah, yang diharapkan dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia didasari beragam faktor, namun faktor utama yang mendorong pesatnya perbankan Syariah di Indonesia didasari oleh mayoritas penduduk yang beragama muslim, yaitu sebanyak 87,18% dari keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan faktor itu, maka diperlukan adanya bank syariah (sistem bagi hasil) berbasis syariah dan menjauhkan hal-hal dari riba. Namun pemahaman masyarakat sendiri masih kabur, dimana mereka masih menilai bank syariah sama dengan bank konvensional padahal dengan kenyataannya bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang sangat mencolok yaitu tidak adanya bunga/riba pada bank Syariah.

Layaknya perusahaan atau bank konvensional, setiap performa dari bank Syariah akan memiliki dampak terhadap seluruh lini pemangku kepentingannya. Dampak yang timbul sendiri tidak selalu negatif dan tidak selalu positif pula, karenanya perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada profit namun juga tetap bertanggung jawab, baik kepada *stakeholders* (aspek sosial) maupun kepada lingkungan. Tanggung jawab ini diharapkan mampu menjaga dampak yang timbul selama ini selama perusahaan beroperasi (*going concern*) sehingga dengan adanya keberadaan perusahaan dapat diterima [Satria, \(2013\)](#).

Untuk mendukung konsep *going concern*, bank Syariah menerapkan pemberlakuan *Islamic corporate governance*, [Hasan, \(2012\)](#). ICG berfokus pada pengelolaan bank dengan standar Syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk mengontrol tata kelola perusahaan agar tetap sejalan dengan agama Islam. Penerapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders*. Dalam maksimalisasi performanya, Bank perlu untuk menerapkan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip ICG. Selain itu penerapan ICG diharap mampu melindungi kepentingan *stakeholders* baik internal maupun eksternal, dan membantu bisnis perbankan mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku serta prinsip-prinsip etika yang diakui secara umum.. ([Trisasmita, 2018](#)).

Penelitian [Chariri \(2012\)](#) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat berpengaruh dalam pelaporan pengungkapan sosial. Sementara itu, tingkat pengungkapan sendiri bisa dilihat dari bagaimana cara kita mengelola dan dapat mengungkapkan pada pelaporan ISR yang direalisasikan oleh perusahaan. ISR berlandaskan syariah dan juga mengembangkan dasar standat laporan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. [Haniffa, \(2002\)](#), dalam [Othman \(2009\)](#).

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1. Landasan Teori.

2.1.1. Teori Agensi.

Teori agency (*agency theory*) menunjukkan bahwa apabila pengelolaan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan maka akan timbul masalah keagenan, yang dalam hal ini yaitu konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham. Oleh karena itu dewan pengawas sebagai agen perusahaan berhak untuk mengelola perusahaan dan mengambil putusan dengan mengatasnamakan kepentingan pemilik. Dengan kekuasaan yang dimiliki, manajer mempunyai kuasa untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk kepentingan pemilik sebagai jalan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) [Riyanto, \(2003\)](#).

Teori agensi juga menjelaskan lebih lanjut tentang bentrokan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Kebebasan pihak manajemen dalam mengelola dan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kepentingan pribadi dapat meningkatkan kecurigaan terjadinya manipulasi atau kecurangan yang pada akhirnya akan berdampak merugikan bagi perusahaan. Di sini *Corporate Governance* berfungsi sebagai alat yang menjamin bahwa kepentingan dari pihak yang tidak termasuk para pihak manajemen dapat tetap terpenuhi, [Herawati,\(2008\)](#).

2.1.2. Perbankan Syariah.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berjalan atas asas hukum Islam. Kata kuncinya adalah pelarangan penggunaan bunga (pinjaman riba) dalam transaksi pinjaman. Lebih lanjut lagi, dalam bank Syariah juga dilarang melakukan investasi yang berbunga “Riba”. Perkembangan bank Syariah dimulai pada tahun 1992 saat Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan. Secara praktis, Bank Syariah memberikan pelayanan perbankan yang bersumber atau berdasar pada hukum dan syariat Islam. Lebih luas lagi, selain larangan terhadap riba, terdapat etika bisnis yang mengharuskan setiap kegiatannya harus selalu menjunjung asas halal sesuai dalam hukum Islam. Secara umum banyak produk yang ditawarkan oleh bank Syariah antara lain; *qard-al hasan* (dana kebijakan), implementasi penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta prioritas pembiayaan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing/ PLS*) dalam bentuk produk *mudharabah* dan *musyarakah*

2.1.3. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Kinerja keuangan yang baik menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pada perusahaan. Secara umum, pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Secara kompleks, kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai cara namun yang paling sering dipakai adalah dengan melakukan pengukuran terhadap rasio profitabilitasnya [Wahususmiah, \(2015\)](#). Lebih jauh dari pada itu, performa kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia juga dapat diukur dengan *value* kinerja. Melalui *value* kinerja dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada perusahaan, hal tersebut kemudian dapat dipahami agar bisa dicontoh dan perusahaan bisa mengambil langkah dalam memperbaiki kekurangan yang terjadi [Kusuno, \(2008\)](#) dalam [Meliani ,\(2015\)](#). Sebagai katalisator, Perbankan syariah turut bertindak sebagai penunjang dalam melakukan pembangunan ekonomi pada bangsa Indonesia melalui upaya dalam peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional.

Dalam mengukur kinerja, dapat dilakukan dengan menguji rasio dari performa keuangan perusahaan. Umumnya, rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini adalah rasio profitabilitas, dimana rasio ini mampu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profit) [\(Hanafi dan Halim, 2012\)](#). Analisis rasio dalam profitabilitas yang dilakukan untuk mengukur suatu tingkat dalam efisiensi profitabilitas dan usaha yang baik, dapat dicapai oleh kerja keras pada perusahaan dan profitabilitas ini merupakan perhitungan yang ada untuk menilai tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

BOPO digunakan untuk membandingkan rasio biaya operasional dimana indikator pengukurannya diukur untuk mendeteksi efisiensi. Artinya, semakin kecil rasionya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi dan kinerja manajemen dikatakan menjadi semakin baik dalam menggunakan sumber daya [\(Riyadi,2006\)](#). Untuk melakukan pengukuran biaya operasional dan biaya pendapatan salah satu caranya adalah dengan melakukan perbandingan antara biaya operasional pada pendapatan operasional yang sudah dikeluarkan. Pengukuran ini juga dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi. Oleh karena itu rasio BOPO merupakan salah satu hal yang penting sebelum investor yakin dan menyetujui atau melakukan investasi pada perusahaan. [\(Fries & Taci, 2005\)](#).

2.1.5 Islamic Corporate Governance.

Berdasarkan kebijakan dalam komite nasional pada *corporate governance*, pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan sesuai dengan pedoman yang ada merupakan salah satu indikator yang dapat membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah yang berkesinambungan, dimana hal ini mempengaruhi performa jangka panjang perusahaan. Berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku dengan demikian muncullah sebuah konsep pemikiran bagaimana Islam dapat mengelola dan melaksanakan sebuah proses bisnis, dalam konsep Islam lebih ditekankan pada pengelolaan bisnis yang sehat dan berdasarkan prinsip –prinsip syariah yang sudah ditentukan.

Tata kelola perusahaan yang baik berkapasitas untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan menghindari konflik kepentingan. Pemangku kepentingan utama dalam bisnis Islam adalah Dewan Syariah, yang berfungsi sebagai dewan penasihat dan pengawas kepatuhan syariah, dan bertugas dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah. [Abdullah \(2014\)](#). Inilah perbedaan antara *corporate governance* syariah dan konvensional, dimana *corporate governance* perbankan syariah mengutamakan untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan terpeliharanya kebutuhan manusia. sesuai *maqasid al-syariah* [Abdullah, \(2014\)](#).

Secara global *Islamic corporate governance* termasuk kedalam kategori *Good corporate* yang mengatur dan mengandalkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang–undangan dan nilai-nilai etika ([Sutedi, 2011](#)). Sebenarnya, ICG dan Corporate Governance konvensional mengejar tujuan yang sama, yang menjadi pembeda hanyalah kode moral berbasis agama Islam,

Dengan demikian, muncul teori agensi yang mengatur tentang hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan yang selanjutnya dikenal dengan istilah *good corporate governance*, dalam teori agensi sendiri terdapat 5 prinsip yaitu::

1. Akuntabilitas

Dalam perbankan syariah praktik operasional harus benar dan sesuai dilakukan sejalan dengan prinsip syariah. Untuk mendukung hal ini maka peran pada Dewan Pengawas Syariah sendiri harus benar-benar diawasi dalam operasionalnya agar sesuai dan berjalan dengan norma-norma syariah yang berlaku dan disepakati bersama. Dengan begitu diharapkan perusahaan mampu menunjukkan performa yang lebih efisien dan dapat menghasilkan perluasan jaringan serta dapat lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya.

2. Keterbukaan

Pada prinsip keterbukaan fokusnya adalah bagaimana penerapan ICG mampu mengemukakan fakta yang relevan dan materiil dalam produk bank syariah. Keberadaan ICG di perbankan sendiri seharusnya mampu menjadi pendorong dalam mengemukakan fakta, sehingga perusahaan akan lebih terbuka dalam setiap proses dan perkembangan yang sedang dijalankan. Dilain sisi, unsur keterbukaan ini juga harusnya dapat menjadi kompas bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola perbankan syariah yang jujur dan transparan. Oleh karena itu, dalam mengelola perbankan syariah pihak perbankan harus tetap meletakkan sifat yang jujur dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabahnya.

3. Tanggung jawab

Dalam prinsip tanggung jawab, unsur yang lebih ditekankan adalah kesesuaian dalam mengelola bank dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar terciptanya sistem pengelolaan yang baik dan sehat. Prinsip ini juga bermakna agar pengelola tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dengan bertujuan untuk meningkatkan pada nilai tambah dari produk dan jasa kepada pemegang saham.

4. Professional

Konsep ini menekankan pada proses pengelolaan perbankan syariah dimana pengelolaan harus dilaksanakan secara profesional. Artinya dalam prosesnya tidak boleh ada tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari *conflict of interest*, dengan begitu pengelolaan bank dapat bebas dan terhindar dari kepentingan sepihak, terutama yang berpotensi

merugikan *stakeholders*.

5. Kewajaran

Kewajaran pada prinsip ini berfokus pada adanya unsur kesetaraan dan keadilan. Dalam hal ini, pengelola harus selalu memberikan akses kepada para *stakeholders* terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan selama masih berkaitan dengan kepentingan bank ataupun kepentingan bersama.

[Khoirudin \(2013\)](#) dan [Gestari \(2014\)](#) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, dimana hal ini dikaitkan dengan fungsi akuntabilitas dewan komisaris sebagai pengawas manajemen agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik. [Gestari \(2014\)](#) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara DPS terhadap kinerja keuangan. Lebih lanjut dia membahas bahwa rapat DPS dilakukan secara bermusyawarah dalam mencapai mufakat dengan frekuensi yang wajar. [Gestari \(2014\)](#) mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara frekuensi rapat komite audit terhadap kinerja keuangan. Karenanya setiap rapat harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut maka komite audit juga dituntut untuk memperhatikan suatu persoalan yang dituangkan pada sebuah rapat yang dilakukannya. Dalam *Islamic Corporate Governance* penelitian ini menggunakan proksi dalam mengukur ICG sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris
2. Dewan Pengawas Syariah
3. Komite Audit

2.1.6. Islamic Social Reporting.

Islamic Social Reporting atau index ISR yaitu standar pengungkapan sosial yang menggunakan pedoman Syariah dalam basis pelaporannya, variabel ICSR pada penelitian ini menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan oleh [Haniffa.\(2002\)](#) yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pertama kali. Indeks ini mengacu pada standar AAOIFI. Dimana terdiri dari 6 tema yang dibagi lagi menjadi 46 item indikator. Metode pengukuran mencakup sistem penilaian yang akan memberikan skor untuk setiap indeks yang disediakan dalam laporan tahunan bank syariah. Jika item diungkapkan, menerima skor "1," dan jika tidak, menerima skor "0."

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan regresi logistik sebagai alat uji analisisnya. Kedua uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh hubungan dari masing-masing variabel uji. Persamaan regresi berganda dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja Keuangan a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Dewan Komisaris

X2 = Dewan Pengawas Syariah

X3 = Komite Audit

X4 = *Islamic Social Reporting*

Tabel 1. Perhitungan Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
Dewan Komisaris	Unsur dalam perusahaan yang berperan sebagai pengawas serta sebagai pemberi nasihat terhadap direksi	Σ = rapat dewan komisaris
Dewan Pengawas Syariah	Unsur dalam perusahaan yang berperan sebagai penunjang dan pengawas agar perusahaan tetap berjalan sesuai standar syariah.	Σ = <i>rapat</i> dewan pengawas syariah
Komite Audit	Komite yang diisi oleh para dewan komisaris yang berfungsi melakukan audit terhadap fungsi dari jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan	Σ = rapat komite audit
ISR	Tanggung jawab social perusahaan yang dilakukan dengan asas islami	$ISR = \frac{\text{Jumlah item yg digunakan}}{\text{Jumlah skormaksimal}}$
Kinerja Keuangan	Gambaran perdorma keuangan bank pada suatu periode tertentu	$BOPO = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$

Penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu non-probability sampling, dimana sample yang dipilih adalah bank Syariah yang ada di Indonesia. Secara lebih rinci, terlampir indikator dalam pemilihan sampel pada penelitian ini

1. Bank Umum Syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.
2. Bank Umum Syariah mengungkapkan laporan ISR dalam laporan tahunannya.
3. Bank Umum Syariah memiliki data yang lengkap terkait dengan variable- variabel yang digunakan dalam penelitian.

Dari beberapa kriteria tersebut maka didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 2. Nama Bank

No.	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Central Asia Syariah
3	Bank Jabar Banten Syariah
4	Bank Mega Syariah
5	Bank Muamalat
6	Bank Negara Indonesia Syariah
7	Bank Panin Syariah
8	Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
9	Bank Rakyat Indonesia Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	Bank Syariah Mandiri
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13	Bank Victoria Syariah
14	Maybank Syariah Indonesia

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data kelolanya. Dimana sumber data sekundernya diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perbankan syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 perusahaan sampel.

4. Hasil dan Pembahasan

Artikel ini dibuat untuk mengidentifikasi kinerja keuangan perbankan syariah serta memberikan informasi dan menambah kepercayaan kepada masyarakat di Indonesia terhadap Bank Syariah. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terlisting di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018, sehingga diperoleh populasi sebanyak 14 bank umum syariah. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 5 tahun, sehingga dalam jumlah keseluruhan terdapat 70 sampel. Sehingga pemilihan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari *mean*, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum menggambarkan persebaran data dari masing-masing variabel. Hasil deskriptif untuk variabel BOPO dan 70 sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,974310 dengan standar deviasi sebesar 0,2821489, BOPO menunjukkan nilai minimum atau nilai terendah sebesar 0,6240 pada perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2018 dan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 0,21740 pada perusahaan Bank Panin Syariah 2017.

- a. Variabel Dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah dari rapat dewan komisaris selama setahun. Hasil dari statistik deskriptif menunjukkan nilai dengan rata-rata DK sebesar 11,5429. Dimana nilai minimum pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia di tahun 2018 sebesar 2,00 dan nilai max 34,00 yang diperoleh pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 2015. Menurut [Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009](#) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan, jadi selama setahun dewan komisaris wajib melaksanakan rapat 6 kali sedangkan yang dilakukan oleh perusahaan Bank Rakyat Indonesia di tahun 2018 sebesar 2 kali dan nilai maksimum sebesar 34 kali yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 2015, jadi

dapat disimpulkan dengan ini menandakan bahwa masih ada perbankan yang belum menerapkan atas wajib jumlah rapat dewan komisaris dalam setahun yang sudah ditentukan oleh PBI.

- b. Variable Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah rapat dewan pengawas syariah selama satu tahun. Hasil statistik deskriptif yang diperoleh menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14,1429, sementara untuk nilai minimum terdapat pada perusahaan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 2014 sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar Bank Victoria Syariah 2014 sebesar 30,00. Berdasarkan [Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009](#) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan artinya dewan pengawas syariah wajib melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dalam setahun, nilai minimum rapat DPS adalah 4 kali, jadi dapat disimpulkan dengan ini menandakan bahwa masih ada perbankan yang belum menerapkan batas wajib jumlah rapat dewan pengawas syariah dalam setahun yang sudah ditentukan oleh PBI.
- c. Komite Audit diukur dengan jumlah rapat komite audit selama satu tahun hasil statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata audit (X3) sebesar 12, X3 menunjukkan nilai minimum pada perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2014 sebesar 3,00 & Bank Victoria Syariah 2014 sebesar 3,00, dan nilai maksimum sebesar pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 2015 sebesar 37,00.

Islamic Social Reporting atau Index ISR yaitu standar pengungkapan sosial yang sejalan dengan pedoman syariah, dalam penelitian ini variabel ICSR menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan oleh [Haniffa,\(2002\)](#) yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pertama kali. Yang acuannya pada standar AAOIFI. ISR terdiri dari 6 tema utama yaitu pendanaan dan investasi (*finance and investment*), tata kelola perusahaan, karyawan (*employees*), masyarakat (*society*), lingkungan (*environment*), dan produk (*product*) tata kelola perusahaan, *Islamic social reporting* terdiri dari 46 item indikator, dimana dilakukan skoring dengan memberikan nilai pada setiap indeks yang diungkapkan pada laporan tahunan (*annual report*) bank syariah. Jika terdapat item yang diungkapkan maka akan mendapat skor “1”, dan jika tidak maka akan mendapat skor “0”. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata ISR 0,10254 dan untuk menunjukkan nilai minimum pada perusahaan Bank BNI Syariah 2014 sebesar 0,13 dan nilai maksimum pada Bank Mandiri Syariah 2014 sebesar 0,63. Menurut [Setiyowati \(2015\)](#), semakin banyak item yang diungkapkan pada ISR maka akan semakin baik pada kinerja keuangan. Hasil penelitian lain yang menunjukkan hasil tidak ada pengaruh antara ISR terhadap kinerja keuangan bank umum syariah seperti penelitian [Mosaid & Boutti \(2012\)](#).

5. Kesimpulan

Kebijakan perbankan syariah diatur dan dibuat oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang tergabung bersama-sama dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh PBI. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah tindakan-tindakan atau langkah pemilihan alternatif oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum atau publik. Diantara berbagai kebijakan pemerintah itu, dikenal juga istilah kebijakan publik. Kebijakan publik bertujuan untuk membentuk keseimbangan dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, dalam menyeimbangkan maka kebijakan publik harus memberikan rasa yang adil kepada semua lapisan masyarakat. Sebelum kebijakan publik dapat diterapkan di lingkungan masyarakat, maka diperlukan langkah analisis kebijakan. Analisis kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan masyarakat untuk membantu dan mengatur masyarakat sehingga dapat menciptakan kebijakan yang baik. Langkah analisis sendiri perlu dilakukan guna menentukan pengambilan keputusan yang baik, signifikan dan lebih efisien oleh penyalur kebijakan dan pembuat keputusan.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, perlu adanya evaluasi kebijakan publik. Evaluasi dalam kebijakan publik dilakukan untuk memperlihatkan apakah kebijakan publik tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini perlu diperhatikan, karena dalam implementasi kebijakan publik sering kali terdapat hambatan sehingga pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri tidak bisa menjadi jawaban untuk mengatasi masalah yang ada. Sehingga dapat diartikan, evaluasi kebijakan dibuat untuk melihat apa saja sebab-sebab kegagalan dari suatu kebijakan atau untuk dapat mengetahui apakah kebijakan publik tersebut yang telah dijalankan dapat memberikan dampak yang diinginkan.

Limitasi dan studi lanjutan

Pada penelitian ini yang menjadi limitasi atau kelemahan adalah kurangnya data yang diperoleh sehingga memiliki keterbatasan pada saat proses penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih luas lagi mendeskripsikan terkait kinerja keuangan perbankan syariah sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dan lebih maksimal dalam menjelaskan fenomena. Untuk rencana ke depannya penulis berharap perbankan Syariah dapat terus memperbaiki performa kinerja keuangannya dan terus mengawasi pelaksanaan ICG mereka.

Ucapan terima kasih

Puja dan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kami segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada Bapak Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Sc. Akt., & Ibu Chara Pratami Tidespania T, S.E.M.Acc, Akt., CIBP., CA selaku pembahas dan pembimbing tugas Ujian Akhir. Jika ada kata yang lebih agung dari Terimakasih, penulis mungkin akan menyuarakannya ribuan kali. Meskipun Artikel saya masih jauh dari kata sempurna, Semoga hasil yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

Referensi

- Abdullah, M. M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. in Perpustakaan Nasional RI.
- Chariri, Charles. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Bank Syariah di Asia). *Diponegoro Journal Of Accounting*
- Fries, S., & Taci, A. (2005). Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-Communist Countries. *Journal of Banking & Finance*, 29(1), 55-81.
- Gestari, Intan. (2014). Pengaruh Goodcorporate Governance dan Profitabilitasterhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hanafi, M.M., dan Abdul Halim. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Haniffa. (2002). *Social Reporting Disclousure :An Islamic Perspective Indonesia Management & Accounting Research*, 1(2),128-146.
- Hasan. (2012). Desentralisasi dan Impilkasi terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid"*, 1(2)..
- Herawati. (2008). *Evaluasi Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit dalam Meminimalisasi Kredit Bermasalah pada PT.Bank BNI 46 Cabang Majalaya*.
- Hidayah, Erna. (2008). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan Antara Penerapan CG dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12 (1).
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Indonesia, B. (2009). *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Peraturan Nomor, 11, 33.
- Khoiruddin, Amirul. (2013). *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).
- Kusuno. (2008). Hubungan Penerapan Good Governance Busines Syariah Terhadap Islmic Financial

Performance Index Bank Syariah di Indonesia.

- Meliani, S.E. (2016) Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GGBS) *Voluntary Disclosure* (Studi pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014). *Jurnal Eka CIDA*, 1(1), 125-139.
- Mosaid, Fadma El. dan Boutti, Rachid. (2012). Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banking. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(10).
- Othman, R., Thani, A.M., & Gahni, E.K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah – Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, Vol 12 (12), 4-20.
- Riyadi, Slamet. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riyanto. (2003). Model Kontijensi Sistem Pengendalian: Integrasi dan Ekstensi untuk Future Research. *KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi FE UTY Yogyakarta*, 9, 330-342.
- Satria. (2013). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013).
- Setiyowati, Herli Setiawan. (2015). Faktor Penentu Pendapatan Margin Istishna pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Bandung*, 13(1).
- Sutedi. (2011). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia.
- Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(1). http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urbanDOI:10.22236/alurban_vol2/is1pp81-91, Hal 81-91.
- Wahasusmiah. (2015) Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Secara Syariah terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan. *Aparociding Sriwija Ya Economic and Business Conference*. Universitas Bina Darma.